

Diteken, Kerjasama Muhammadiyah-Menteri Perdagangan

Kamis, 29-08-2013



Jakarta—Bertempat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng Jakarta, Kamis (29/8), baru saja selesai ditandatangani Kerjasama Peningkatan Edukasi di Bidang Perlindungan Konsumen dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, antara Muhammadiyah dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menandatangani kerjasama tersebut di hadapan sekitar 250 pedagang binaan Muhammadiyah.

“Melalui Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat terwujud konsumen cerdas dan pedagang pasar/warung yang bertanggungjawab, serta percepatan penyelenggaraan perlindungan konsumen baik dari segi kejujuran, kebersihan dan ketertiban melalui pendekatan religius,” ujar Gita.

Pada acara yang juga dihadiri Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA--Menteri Keuangan Republik Indonesia ke-21 dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia ke-24 yang saat ini menjabat Ketua PP Muhammadiyah, ini-- Gita mempersilahkan Muhammadiyah mempersiapkan pengusaha-pengusaha yang dimiliki, agar bermitra dengan banyak bentuk usaha asing di Indonesia yang memang pada tataran tertentu harus bermitra dengan pengusaha lokal.

“Saya berharap kemitraan-kemitraan mereka akan memilih Muhammadiyah. Dengan demikian, kerjasama ini akan berlanjut. Saya mempercayai, organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah jelas berperan penting dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen serta pedagang yang bertanggungjawab karena memiliki sumber daya yang besar dari segi komposisi, kuantitas, maupun kualitas,” kata Gita.

Gita menyadari sepenuhnya bahwa program Pemerintah yang telah dirancang dengan sangat baik tidak akan berarti tanpa dukungan dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, imbuh Gita, dirinya

memberikan apresiasi kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas sikap tanggap dan dukungannya kepada Pemerintah untuk turut serta mengembangkan wawasan perlindungan konsumen serta pemberdayaan pasar tradisional.

Sementara itu dalam sambutannya, Din Syamsuddin menyatakan, bahwa pemberdayaan ekonomi bagi warga Muhammadiyah selama ini dirasakan sungguh sangat penting. Hal itu bahkan menjadi salahsatu pilihan strategis Muhammadiyah.

“Maka kita berharap, Pemerintah tidak terlalu membuka keran terlalu lebar bagi asing masuk ke Indonesia, karena jika itu dilakukan, akan melahirkan konglomerasi yang dapat menyingkirkan para pedagang lokal, khususnya yang Muslim,”kata Din.

Menurutnya, Pemerintah tidak boleh melakukan ‘perselingkuhan’ dengan Pedagang karena itu menjadi salahsatu bentuk kekerasan di bidang ekonomi yang akan merugikan rakyat.

“Kekerasan warga itu ada karena adanya perselingkuhan Capital Violence anda State Violence. Maka pada sewaktu-waktu, kadang kekerasan warga dengan alasan tersebut, harap dimaklumi,”tambah Din.

“Banyak gedung pencakar langit berdiri, tetapi di bawahnya banyak rakyat miskin kesulitan menemukan air dan makanan. Tentu pembangunan semacam itu tiada berguna. Jangan terjebak kapitalistik, dan negara harus hadir, dan memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal, agar tidak terjadi fenomena semacam itu,” tuturnya.(mst)